

EXECUTIVE SUMMARY

**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN TERHADAP
NELAYAN TRADISIONAL**

TIM PENELITI

DR. SUKARMAN KAMULI, M.Si

ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH



**BADAN LINGKUNGAN HIDUP, RESEARCH, DAN
SISTEM INFORMASI (BALIHRISTI)
TAHUN 2012**

EXECUTIV SUMMARY

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BAGI NELAYAN TRADISIONAL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

TAHUN 2012

Dari penelitian dan kajian yang mendalam tentang Implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara yang telah berlangsung sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 153 Tahun 2008 sudah berdampak terhadap nelayan tradisional. Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan berdampak pada beberapa aspek: *Pertama*, Pendapatan Nelayan Anggota Minapolitan meningkat yaitu Rp. 2.083.333 perbulan dari sebelumnya Rp. 725.000 perbulan. Pendapatan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nelayan telah melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo sebesar Rp. 837.500 (SK Gubernur No. 315/12/XI/2011 tanggal 14 November 2011). Telah terjadi peningkatan akses jalan dari sebelumnya jalan setapak yang sulit dilalui kendaraan roda empat, kini telah terbuka dan menjadi jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat hingga mencapai titik-titik kawasan minapolitan.

Kemudahan akses tersebut telah membawa perubahan khususnya terbukanya jalur yang memungkinkan para nelayan mengangkut hasil produksinya ke tempat-tempat penampungan. Hal yang menjadi kendala yakni belum adanya pasar yang dibangun di desa atau titik-titik kawasan minapolitan sesuai target Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Renstra 2010-2014), yaitu tiap desa yang menjadi kawasan minapolitan akan dibangun satu pasar. Akibatnya kualitas hasil produksi nelayan menurun. Selanjutnya investasi yang diharapkan terjadi baik dari masyarakat, swasta maupun BUMN belum tumbuh dengan baik. Transaksi masih lebih dominan diperankan oleh pedagang antara atau tengkulak, sementara pihak swasta maupun BUMN belum melakukannya.

Keterlibatan pihak Bank misalnya belum berani melakukan investasi dalam bentuk memberi pinjaman ke para nelayan. Hal ini terjadi karena pihak bank menghendaki para nelayan harus memiliki jaminan atau agunan sebagai syarat memperoleh pinjaman. Sementara itu di kawasan titik-titik minapolitan belum tersedia koperasi yang dapat membantu baik dari sisi modal, juga membeli atau menampung hasil produksi para nelayan. Akhirnya Kegiatan ikutan yang diharapkan tumbuh subur dengan adanya implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan belum berjalan memperlihatkan aktivitas yang berarti. Yang ada hanya sentra pembuatan roti khas rumput laut atau roti manis dan pembuatan abon ikan. Peluang untuk mengembangkan kegiatan ikutan masih berpeluang

dilakukan dengan catatan perlu pendampingan/pelatihan SDM khususnya ibu-ibu nelayan yang memiliki jiwa wirausaha mandiri dan produktif.

Agar implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal:

- Melakukan pemetaan SDM nelayan yang tergabung dalam kelompok minapolitan, baik sebagai nelayan penangkap ikan maupun nelayan pembudidaya.
- Melakukan pendataan secara akurat kelompok-kelompok nelayan yang produktif dan yang tidak produktif sebagai acuan dalam memberikan bantuan atau kebijakan lain yang benar-benar membentuk karakter nelayan yang mandiri dan bertanggungjawab.
- Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara No. 154 tahun 2008 untuk lebih memaksimalkan peran masing-masing sesuai TUPOKSI dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengupayakan terbentuknya Koperasi Nelayan di kawasan minapolitan: Anggrek (minapolis), Kwandang dan Sumalata (hinterland).
- Mengupayakan tersedianya akses pasar sebagai tempat memasarkan hasil produksi, baik perikanan tangkap dan budidaya.
- Mengupayakan areal yang permanen dan luas untuk penjemuran hasil rumput laut yang dapat menjamin kualitas sehingga harga jual rumput laut dapat bersaing dengan daerah-daerah lain.
- Mengupayakan para tenaga penyuluh lapangan yang memiliki kompetensi, baik dari jumlah maupun kemampuan dalam berkomunikasi dengan nelayan setempat dan berdomisili yang tidak jauh dari kawasan minapolitan.
- Mengusahakan agar kawasan/area minapolitan tidak dijadikan sebagai daerah kawasan penambangan yang akan merusak lingkungan dan ekosistem disepanjang pesisir laut.
- Untuk pengembangan kegiatan ikutan agar tumbuh subur dengan adanya implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan hendaknya para ibu-ibu nelayan dapat dimotivasi untuk mengembangkan usahanya agar tingkat kesejahteraan keluarga meningkat.
- Mengajak anggota nelayan minapolitan yang berprestasi untuk melakukan studi komparasi ke daerah-daerah yang program/kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang telah maju seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Sebaiknya para nelayan diberi pelatihan keterampilan selain sebagai penangkap ikan dan pembudidaya seperti memperbaiki mesin ketinting atau lainnya, agar biaya pemeliharaan peralatan dapat ditekan sekecil mungkin.
- Dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan kepastian jaminan hidup, serta usahanya sebaiknya anggota nelayan tersebut diasuransikan, baik peralatannya maupun jiwanya.